

Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Windhu Putra*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi anggaran. Kedua, untuk mengetahui hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan efisiensi anggaran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui pendekatan analisis DEA (Data Envelopment Analysis) dan Pengujian Regresi Linier didapat hasil sebagai berikut: Pertama, terjadi perbandingan efisiensi antara kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran, dimana Kota Pontianak menjadi benchmark bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, terdapat hubungan yang significant yang positif antara besaran belanja dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara efisiensi anggaran dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

JEL: E62

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran Belanja Daerah, Perbandingan Efisiensi Kabupaten/kota.

1. PENDAHULUAN

Di beberapa negara, isu-isu efisiensi pengeluaran publik menjadi perhatian. Setidaknya ini tercermin dalam berbagai penelitian. Studi efisiensi belanja publik dalam kasus di negara-negara berkembang memfokuskan pada pengukuran belanja masyarakat. Seperti diteliti oleh (Gupta et al., 2001) bahwa yang melakukan pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Penelitian pada periode 1984-1995 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran dalam dua sektor tersebut tidak efisien. Hal ini juga terkait yang dilakukan oleh (Ouertani et al., 2018) di Arab Saudi selama periode 1988-2009. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja publik yang tidak menjamin peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Sementara di Indonesia, khususnya efisiensi (Pemkot) pemerintah daerah telah menjadi perhatian Menteri Keuangan. Pemerintah daerah seharusnya bisa menerapkan pengeluaran yang efisien untuk mendesentralisasi fiskal dengan merancang asumsi bahwa pemerintah daerah lebih sadar akan kebutuhan dan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa pendapatan mereka diharapkan dapat dihabiskan di masing-masing bidang sesuai dengan

* E-mail: windhuputra64@gmail.com

kebutuhan masyarakat melalui manajemen kebijakan desentralisasi, pengelolaan dan pengembangan mekanisme yang efektif dan efisien melalui kepatuhan yang lebih besar pada otoritas lokal.

Sehubungan dengan efisiensi belanja, terutama pengeluaran pemerintah daerah, Menteri Keuangan mengatakan bahwa alokasi dana dalam anggaran, masih banyak yang tidak efisien. Dia mengatakan banyak pemerintah daerah menghabiskan anggaran hanya untuk upah gaji atau biaya tenaga kerja. Pada tahun 2020 anggaran pemerintah pusat Rp 858,8 triliun sekitar 34 persennya untuk TKDD. Selain itu, dari 389 pemerintah daerah, sebagian besar mengalokasikan untuk pendapatan tambahan sangat bervariasi dan sering ditemukan tambahan untuk perangkat sipil negara di daerah yang tidak terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi (Syadullah, 2019).

APBD tahunan pemerintah daerah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan alat untuk melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi anggaran mudah dilakukan. Di sisi lain, anggaran dapat digunakan berbagai pihak untuk mengetahui baik dari segi pendapatan dan pengeluaran sisi.

Menurut Peraturan Nomor 21 tahun 2011, anggaran tahunan dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dimana didalam Anggaran tersebut disepakati beberapa kebijakan utama bagi pemerintah daerah untuk menentukan jumlah pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Ada beberapa elemen dari anggaran, yaitu: 1) Skema operasi dari suatu daerah, bersama dengan penjelasan rinci. 2) Sumber pendapatan minimum untuk menutupi kegiatan tersebut. 3) Adanya belanja maksimum dalam bentuk pengeluaran yang akan dilaksanakan. 4) Jenis kegiatan dan proyek-proyek dalam bentuk nilai angka dalam periode anggaran yang biasanya satu tahun. Belanja pemerintah merupakan sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan atau pendapatan.

Belanja pemerintah juga merupakan indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Indikator ini merupakan pendekatan jasa publik yang merupakan perlindungan sosial. Mengingat pentingnya hal ini maka dampak efisiensi belanja pemerintah pada indikator tersebut harus menjadi perhatian. Kebijakan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, pendekatan kinerja penganggaran lebih mengutamakan hasil (output) berdasarkan prinsip penganggaran yang direncanakan. Fenomena umum yang dihadapi oleh mayoritas pemerintah daerah di Indonesia dalam bidang keuangan daerah peran PAD yang relatif kecil dalam struktur anggaran daerah (APBD). Hal ini karena pendapatan daerah adalah refleksi dari potensi ekonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memposisikan PAD sebagai kriteria otonomi daerah. Dengan kata lain, berapa banyak kontribusi PAD terhadap seluruh penerimaan daerah (Harliza & Anitasari, 2017).

Sebuah pemahaman penuh dari sistem perencanaan dan penyusunan anggaran sangat penting, karena tidak hanya tentang pengeluaran yang direncanakan, tetapi juga pembuat kebijakan nasihat tentang kelayakan dan keinginan proposal anggaran tersebut, baik pada perspektif makro maupun mikro. Dengan kata lain, itu jauh lebih mudah untuk mengendalikan awal penyusunan anggaran daripada setelah pelaksanaan anggaran (The International Monetary Fund (IMF), n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Jenis belanja, pemerintah terdiri dari; 1) Belanja Tidak Langsung (Indirect Expenditures) dan Belanja Langsung (Direct Expenditures), pasal 36 dan 2) Pembiayaan Daerah (Local Government Financing) pasal 18.

Untuk dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah khususnya melalui pengadaan barang/jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap secara baik. Perlu dilakukan upaya untuk menjamin penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur dilakukan tepat waktu, mengingat hal ini sangat penting sebagai salah satu penentu kinerja ekonomi pemerintah. Hal lain yang masih menjadi sorotan utama publik yaitu terkait proporsionalitas alokasi belanja yang masih didominasi belanja konsumsi dibandingkan alokasi belanja investasi pembangunan dan infrastruktur dasar. Apalagi oleh banyak lembaga Internasional, minimnya kualitas belanja infrastruktur pemerintah sering dianggap sebagai barrier terbesar pembangunan yang belum optimal, salah satunya disebabkan oleh buruknya kinerja birokrasi dalam pengadaan barang/jasa khususnya dalam bidang pengadaan konstruksi infrastruktur (Azwar, 2016).

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan merupakan dana paling besar yang diterima dibandingkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Oleh karena itu daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat harus bisa mencari dan menggali potensi daerahnya dan sumber daya alamnya agar pendanaan pembangunan lebih terarah. Mencermati fenomena yang terjadi tersebut menjadi pertanyaan bahwa bagaimana menciptakan efisiensi pengeluaran belanja daerah sehingga dapat menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih maksimal?. Dalam upaya untuk mengkreasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan dana yang bersumber dari belanja pemerintah. Ketimpangan dalam belanja antara daerah tentu hal ini berpengaruh dalam menciptakan efisiensi dalam keuangan (Solihin & Lesatri, 2010).

Dampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu dapat mencerminkan tingkat pengelola keuangan daerah yang benar, yang mana akan berpengaruh kepada iklim yang kondusif dalam upaya masyarakat untuk melakukan peningkatan pendapatannya. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah kabupaten/kota (Deviani, 2016).

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk bagaimana setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat melakukan efisiensi dalam pengelolaan belanja sehingga mampu menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal. 2) Apakah ada dampak efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ekonomi wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi anggaran. 2) Untuk mengetahui hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan efisiensi anggaran dalam menciptakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi: 1) Membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan untuk daerah Kabupaten dan Kota, 2) Memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan khususnya ilmu Keuangan Daerah

Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi anggaran telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti antara lain ; 1) Dari hasil penelitian (Sianturi, 2014) di Kota Batu, rata-rata tingkat penerimaan PAD terhadap Total Penerimaan daerah sebesar 5,6%. Jumlah ini merupakan jumlah yang relatif masih sangat kurang,

karena tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah dari PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan masih besarnya ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

Hal ini disebabkan oleh ; (i) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi, (ii) sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai (iii) kompetensi sumber daya aparatur yang kurang. 2) Dari hasil penelitian (Nurabiah, 2018) tentang analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016. Populasi dari penelitian ini 10 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP di provinsi Nusa Tenggara Barat dan data yang digunakan yaitu data sekunder.

Analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keselaran, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan antara pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP menunjukkan rasio yang berbeda sehingga tingkat kerjanya juga berbeda. 3) Penelitian juga pernah dilakukan oleh (Kusmila, Mukhzarudfa, & Yudi, 2018) yang bertujuan untuk membandingkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Menunjukkan bahwa seluruh kabupaten tidak terdapat perbandingan pada kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

Untuk mengetahui hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti antara lain ; 1) Dalam penelitiannya di Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah (Nugroho & Rohman, 2012) menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. 2) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sula oleh (Soamole, 2013) menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.63% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula

Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan efisiensi anggaran dalam menciptakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti antara lain ; 1) Hasil penelitian (Djohan, Hasid, & Setyadi, 2016) menunjukkan bahwa variasi Belanja pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kecil dan negatif, dan terhadap pendapatan tetapi tidak signifikan terhadap variasi dalam pertumbuhan ekonomi. 2) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rarung, 2016) sebagai berikut : Secara Parsial Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dicapai oleh Pemerintah Kota Manado berpengaruh Signifikan. Hal ini berarti bahwa perkembangan PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan PAD yang terealisasi di Kota Manado.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap ini pemerintah tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated).

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, yaitu: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus menyediakan fasilitas yang menjadi tuntutan masyarakat akibat peningkatan pendapatan, seperti; keamanan, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Peacock dan Wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbalik. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: (1) Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam tulisan ini kami telah melihat beberapa variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Undang-undang desentralisasi Indonesia di Indonesia 1999 telah mengubah pengaturan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sepenuhnya, dengan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab otonom untuk mengatur pengeluaran berdasarkan skema pembagian pendapatan baru.

Meskipun desentralisasi penuh ada pada tingkat kota / kabupaten, namun penelitian yang pernah dilakukan oleh (Adiwan, 2010) ini dapat memberikan wawasan singkat tentang desentralisasi fiskal dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia. Dalam temuan tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan Indonesia masih mengarah pertumbuhan ketimpangan, dengan provinsi miskin memiliki pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada kaya negara. Namun, kecepatan ketimpangan telah tertekan oleh krisis keuangan di Indonesia 1997 dan tidak berubah selama desentralisasi. Oleh karena itu, pengeluaran yang lebih tinggi untuk administrasi publik, termasuk lokal upah pemerintah, pelatihan, dan peningkatan layanan publik, harus dipertimbangkan untuk diberikan pemerintahan yang efektif di pemerintahan tingkat daerah.

Desentralisasi fiskal sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2001 selain bertujuan untuk mengurangi baik ketidakseimbangan fiskal vertikal, antara pusat dan pemerintah daerah, juga melihat ketidakseimbangan fiskal horizontal antar pemerintah daerah (Wibowo, n.d.). Dalam penelitian ini Otonomi fiskal disimpulkan, masih relatif lemah di Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan peran penting transfer pemerintah dari anggaran pusat ke daerah dalam mendukung pengeluaran daerah. Selain itu arus ada peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas pemerintah daerah untuk memaksimalkan kuantitas dan kualitas dalam sisi pengeluaran anggaran.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Affandi, 2014).

Metode dalam pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan pendekatan non parametrik yang tidak stokastik, berdasarkan penemuan dan observasi dari populasi dan mengevaluasi efisiensi relatif terhadap unit-unit yang diobservasi (Israwan, Surarso, & Frikhin, 2016). Pendekatan ini dikenal dengan nama *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA biasanya digunakan untuk teori produksi dalam Ilmu Ekonomi, selain itu digunakan pula untuk benchmarking (tolak ukur) dalam manajemen operasi untuk menghasilkan *Decision Making Unit* (DMU) / Unit Pengambil Keputusan (UPK) yang efisien.

Studi mengenai analisa belanja daerah yang diprosikan dalam rasio belanja terhadap PDRB, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja dan menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (Deviani, 2016). Dari pengujian yang dilakukan rasio belanja terhadap PDRB, dan rasio pertumbuhan belanja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun rasio belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dari hasil uji statistik terlihat bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan begitu juga dengan belanja daerah tidak ditemukan pengaruh tidak langsung antara belanja daerah dengan pendidikan melalui pertumbuhan ekonomi.

Implementasi melalui desentralisasi dapat memperluas kewenangan bagi pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Desentralisasi juga cenderung memberikan otoritas lebih besar bagi pemerintah daerah untuk

mengelola dan menangani wilayah daerahnya, termasuk manajemen keuangan sehingga mampu meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi anggaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

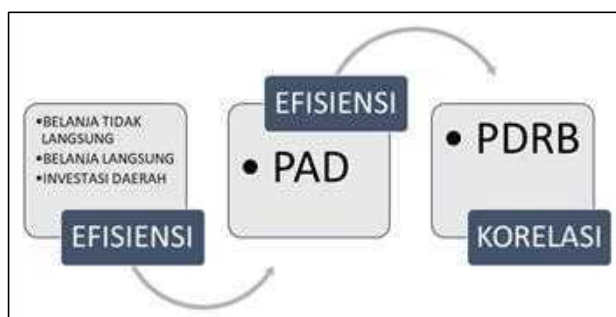
Populasinya terdiri atas seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Teknik analisis yang digunakan adalah partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten/kota Jawa Timur: (1) desentralisasi anggaran memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (2) sebaliknya, anggaran desentralisasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) pertumbuhan ekonomi secara statistik memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) desentralisasi anggaran secara statistik memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pertumbuhan ekonomi (Samekto, 2012).

Artikel ini membahas hubungan teoritis dan empiris antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Analisis empiris wilayah Rusia untuk tahun 2005-2012 menunjukkan bahwa desentralisasi belanja yang berlebihan di wilayah tersebut, yang tidak disertai dengan tingkat desentralisasi pendapatan masing-masing, secara signifikan dan negatif terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional. Sebaliknya, ketergantungan regional pada transfer fiskal antar pemerintah dari pusat federal secara positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi (Yushkov, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam upaya melancarkan proses pembangunan. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda akan berupaya menciptakan stimulus baru dalam mengkreasi unsur pelayanan publik agar upaya peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) akan terasa manfaatnya di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika PEMDA ingin meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan jalan meningkatkan belanja modal, untuk itu PEMDA harus menggali sebesar- besarnya kemampuan keuangan yang ada di daerah.

Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Hipotesis Penelitian

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara besaran belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama untuk mengukur tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai variabel output, sedangkan variabel input adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah. Bentuk penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan dan menganalisis rasio efisiensi relatif dari beberapa daerah.

Tahap Kedua dengan melakukan penelitian eksplanasi asosiatif (explanatory research) yang menjelaskan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependent) secara kuantitatif dengan melalui pembuktian hipotesis, yaitu dengan cara melihat tingkat pengaruh Efisiensi Belanja Daerah sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan di Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu selama 4 bulan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan oleh pihak lain yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain berupa dokumentasi dan arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau publikasi lainnya, meliputi data yaitu; 1) Belanja Langsung, 2) Belanja Tidak Langsung, 3) Penyertaan Modal, 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 5) PDRB.

Definisi variabel

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD kabupaten/Kota. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; dan 3) belanja modal.

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi basil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga.

Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud terbagi menjadi empat kelompok pendapatan, di antaranya: 1) Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir. 2) Retribusi daerah. 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu; a) bagian laba atas

penyertaan modal pada BUMD, b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan 3) bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, dan lainnya. Kemandirian APBD berkaitan erat dengan kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Karena dalam kenyataannya kondisi menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri.

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama penelitian ini, digunakan Data Envelopment Analysis atau disingkat DEA yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 oleh Charnes A, Cooper WW dan Rhodes E dalam jurnal *Operational Research* dengan judul "Measuring The Efficiency of Decision Making Units". Jurnal tersebut membahas pengembangan langkah-langkah pengambilan keputusan efisiensi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi Unit Pengambil Keputusan. DEA adalah teknik berbasis pemrograman linear untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari unit pengambilan keputusan, dengan cara membandingkan antara DMU satu dengan DMU lain yang memanfaatkan sumber daya yang sama untuk menghasilkan output yang sama dimana solusi dari model tersebut mengindikasikan produktivitas atau efisiensi suatu unit dengan unit lainnya. Tujuan akhir dari DEA dimaksudkan sebagai metode untuk evaluasi kinerja dan benchmarking (Israwan et al., 2016).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara input dan output atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Hasil dari perbandingan tersebut kemudian dibandingkan antara banyaknya kabupaten kota yang menjadi pembanding antara satu dengan yang lain. Dimana nilai yang paling efisien di antara kabupaten dan kota akan menjadi patokan untuk bagi yang lain. Sehingga nilai efisiensi relatif akan berada antara $0 < x < 1$, yang berarti apabila nilai rasio mendekati 1 semakin efisien dan demikian sebaliknya.

Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga dari penelitian ini dengan menggunakan Regresi Data Panel yaitu gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) dan N jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, N$), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu,

maka disebut *unbalanced panel*. Sedangkan jenis data yang lain, yaitu: data time-series dan data cross-section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

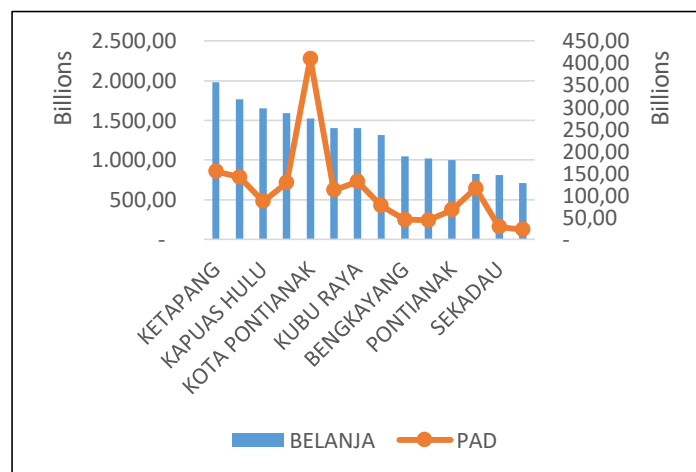
Berdasarkan data Belanja dan PAD melalui pendekatan *Data Envelopment Analysis* maka dapat dinilai seberapa besar nilai efisiensi keuangan pada setiap kabupaten/kota, sebagai berikut: dilihat dari nilai rata-rata efisiensi Kota Pontianak mempunyai nilai efisiensi yang relatif paling stabil yaitu bernilai 1 (satu). Untuk itu Kota Pontianak dapat dijadikan patokan (*benchmarking*) untuk menuju efisiensi bagi daerah lain. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik pendekatan output (Grafik 4-1) dimana Kota Pontianak dibandingkan dengan daerah lain paling efisien dalam memaksimalkan input yang ada. Dengan kata lain bahwa Kota Pontianak dapat memaksimalkan input yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 573.083.360.000,-, Belanja Langsung Rp. 419.114.160.000,- dan Penyertaan Modal Rp. 5.500.000.000,- untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kisaran sebesar Rp. 410,121.390.000,-.

Nilai efisiensi terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 0,22. Dengan kata lain bahwa Kabupaten Kayong Utara belum dapat memaksimalkan input yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 317.801.490.000,-, Belanja Langsung Rp. 392.406.110.000,- dan Penyertaan Modal Rp. 2.000.000.000,- untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kisaran Rp. 100 miliar ,-

4.2. Pembahasan

Analisis Kemampuan Daerah Dalam Melakukan Efisiensi Anggaran

Apabila kita lakukan sorting terhadap anggaran belanja, maka nilai anggaran belanja tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang nilai tertinggi rata-rata Rp. 1.980.855.150.000,- dan sedangkan nilai anggaran terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar Rp. 712.207.600.000,-

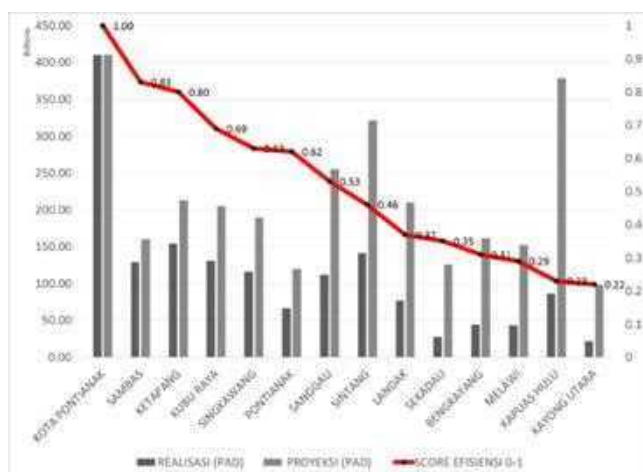


Sumber: Data Olahan APBD Tahun 2015-2018

Gambar 2. Grafik Perbandingan Besaran Belanja dengan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Apabila dilihat untuk kondisi sorting Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengikuti pola dari belanja daerah. Dimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di Kota Pontianak sebesar rata-rata Rp. 410.121.390.000,- dan terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar rata-rata Rp. 21.921.670.000,-. Sehingga hal ini bisa mencerminkan bahwa variasi anggaran yang belanja yang besar belum tentu mampu untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar pula. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djohan et al., 2016) yang selanjutnya mengadakan variasi dalam Belanja pemerintahan memiliki efek positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ini menunjukkan variasi dalam pengeluaran pemerintahan merupakan penentu peningkatan ketimpangan pendapatan di antara kabupaten/kota.

Dilihat dari perbandingan antara kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran yang paling efisien adalah Kota Pontianak dengan nilai efisiensi relative sama dengan 1(satu), dimana bisa dijadikan benchmark bagi daerah kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, adalah daerah Kabupaten Sambas yaitu dengan nilai efisiensi 0,83 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 100 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sambas mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 150 milyar. Ketiga, adalah daerah Kabupaten Ketapang yaitu dengan nilai efisiensi 0,80 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 150 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Ketapang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 200 milyar. Keempat, adalah daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan nilai efisiensi 0,69 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 125 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Kubu Raya mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 200 milyar.



Sumber : Data Olahan APBD Tahun 2015-2018

Gambar 3. Grafik Rata-rata Perbandingan Realisasi dan Prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kelima, adalah daerah Kota Singkawang yaitu dengan nilai efisiensi 0,63 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 110 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kota Singkawang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 180 miliar. Keenam, adalah daerah Kabupaten Pontianak yaitu dengan nilai efisiensi 0,62 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 60 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Pontianak mampu

optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 120 miliar. Ketujuh, adalah daerah Kabupaten Sanggau yaitu dengan nilai efisiensi 0,53 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 110 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sanggau mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 250 milyar.

Kedelapan, adalah daerah Kabupaten Sintang yaitu dengan nilai efisiensi 0,46 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 140 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sintang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 300 milyar. Kesembilan, adalah daerah Kabupaten Landak yaitu dengan nilai efisiensi 0,37 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 75 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Landak mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 200 milyar. Kesepuluh, adalah daerah Kabupaten Sekadau yaitu dengan nilai efisiensi 0,35 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 25 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Sekadau mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 125 miliar. Kesebelas, adalah daerah Kabupaten Bengkayang yaitu dengan nilai efisiensi 0,31 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 45 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Bengkayang mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 150 milyar.

Keduabelas, adalah daerah Kabupaten Melawi yaitu dengan nilai efisiensi 0,29 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 45 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Melawi mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 150 milyar. Ketigabelas, adalah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan nilai efisiensi 0,29 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 75 miliar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Kapuas Hulu mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 375 miliar. Keempatbelas, adalah daerah Kabupaten Kayong Utara yaitu dengan nilai efisiensi 0,22 yaitu dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 20 milyar. Melalui pendekatan output seharusnya Kabupaten Kayong Utara mampu optimalkan anggarannya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat bisa dalam kisaran Rp. 100 milyar.

Analisis Hubungan Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara besaran belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam hasil perhitungan Uji /t statistik sebagai berikut :

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0.319362	6.958780723	0.045893	0.963565
LnBelanja	0.895447	0.251366934	3.56231	0.000777

Persamaan: $y = 0,319 + 0,895x$

Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan Anggaran belanja sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar 0,895 persen. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Rohman, 2012) pada Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah, serta penelitian yang dilakukan oleh (Soamole, 2013) di daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Analisis Hubungan Efisiensi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara efisiensi dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam hasil perhitungan Uji /t statistik sebagai berikut:

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	2.4854	0.1085	22.8993	0.0000
LNEfisiensi	0.6168	0.0990	6.2301	0.0000

Persamaan: $y = 2,4854 + 0,6168x$

Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan efisiensi sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran PDRB sebesar 0,6168 persen. Hasil penelitian ini tidak sesuai penelitian yang pernah dilakukan oleh (Sianturi, 2014) dan (Djohan et al., 2016). Tetapi penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh (Rarung, 2016) di Kota Manado.

5. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

Apabila kita lakukan perbandingan terhadap anggaran belanja, maka nilai anggaran belanja tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang nilai tertinggi rata-rata Rp. 1.980.855.150.000,- dan sedangkan nilai anggaran terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar Rp. 712.207.600.000,-. Apabila dilihat untuk kondisi sorting Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengikuti pola dari belanja daerah. Dimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat di Kota Pontianak sebesar rata-rata Rp. 410.121.390.000,- dan terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, yaitu sebesar rata-rata Rp. 21.921.670.000,-. Sehingga hal ini bisa mencerminkan bahwa variasi anggaran yang belanja yang besar belum tentu mampu untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar pula. Dilihat dari perbandingan antara kabupaten/kota dalam pengelolaan anggaran yang paling efisien adalah Kota Pontianak dengan nilai efisiensi relatif sama dengan 1(satu), dimana bisa dijadikan benchmark bagi daerah kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Terdapat hubungan yang significant dan positif antara Anggaran Belanja dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan Persamaan; $y = 0,319 + 0,895x$. Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan Anggaran Belanja sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,895 persen.

Terdapat hubungan yang significant dan positif antara Efisiensi dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Persamaan tersebut dapat dituliskan dalam hasil perhitungan Uji /t statistik sebagai berikut: Persamaan ; $y = 2,4854 + 0,6168x$. Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut, apabila terjadi peningkatan efisiensi sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan terhadap besaran PDRB sebesar 0,6168 persen.

Rekomendasi penelitian ini adalah harus ada upaya untuk maksimalisasi anggaran belanja bagi daerah kabupaten/kota yang belum efisiensi. Kota Pontianak dapat dijadikan model dalam upaya maksimalisasi anggaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat melalui : 1) memberikan motivasi/kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, (2) menyediakan serta mengoptimalkan sistem informasi dan teknologi yang tersedia (3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

Perubahan mindset dalam menjalankan Kebijakan Umum Belanja Daerah yang mengacu kepada peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom harus tetap disosialisasikan. Yang mana berdasarkan pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari input yang direncanakan, bukan pada prinsip yang lama yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan dana-dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwan, F. (2010). *The Impact of Government Budget shifts to Regional Disparities in Indonesia : Before and After Decentralisation*. Munich Personal RePEc Archive (25243).
- Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2).
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2).
- Deviani. (2016). Analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. *Pekbis Jurnal*, 8(1), 1–13.
- Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. (2016). Government Expenditure as Determinants of Economic Growth and Income Inequality of Inter-Province of the Islands in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(22), 148-158.
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. (2001). *Public Spending on Health Care to the Poor*. IMF Working Paper.
- Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 133–140.
- Israwan, L. F., Surarso, B., & Frikhin, F. (2016). Implementasi Model CCR Data Envelopment Analysis (DEA) Pada Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 76.
- Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel intervening. *Diponogoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–14.

- Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067-100.
- Ouertani, M. N., Naifar, N., & Ben Haddad, H. (2018). Assessing government spending efficiency and explaining inefficiency scores: DEA-bootstrap analysis in the case of Saudi Arabia. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–16.
- Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 449–460.
- Samekto, A. (2012). the Impacts of Budget Decentralization on Economic Growth and Local Government Performance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15(1), 157.
- Sianturi, A. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 557–563.
- Soamole, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula). *Governance*, 5(1), 90–94.
- Solihin, A., & Lesatri, N. A. (2010). Analisis Ketimpangan Fiskal Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*, (1), 20–35.
- Syadullah, M. (2019). *Efisiensi Belanja Daerah*. Investor Dayly.
- The International Monetary Fund (IMF). (n.d.). *Budget Preparation*.
- Wibowo, H. (n.d.). *Measuring Fiscal Decentralisation in Indonesia*.
- Yushkov, A. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: Theory, Empirical Studies, And Russian Experience. *Voprosy Ekonomiki*, 2016(2), 94–110.